

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Deskripsi Pustaka

##### 1. Pendidikan Inklusif

###### a. Pengertian Pendidikan Inklusif

Pengertian atau definisi pendidikan inklusi banyak dikemukakan oleh para ahli. Definisi dari masing-masing ahli tersebut secara redaksional memang berbeda, tetapi pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan yang sama. Istilah inklusi itu sendiri dalam dunia pendidikan dikaitkan dengan model pendidikan yang tidak membeda-bedakan individu berdasarkan kemampuan dan atau kelainan yang dimiliki oleh individu.

Pendidikan Inklusif secara resmi didefinisikan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya.<sup>1</sup> Menurut Dadang Garnida, Pendidikan inklusif merupakan “sistem penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan tertentu dan anak-anak lainnya yang disatukan dengan tanpa mempertimbangkan keterbatasan masing-masing”.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut Sumiyati, pendidikan inklusif adalah, “sistem layanan pendidikan yang terbuka dengan mengakomodasi semua peserta didik yang membutuhkan pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus dan peserta didik lainnya tanpa diskriminatif dengan cara belajar bersama”.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Mohammad Takdir Ilahi, *Pendidikan inklusif Konsep dan Aplikasi*, (Ar-ruzz Media, Jogjakarta, 2013), 26

<sup>2</sup>Dadang Garnida, *Pengantar Pendidikan Inklusif*, (PT Refika Aditama, Bandung, 2015), 48

<sup>3</sup>Sumiyati, *Paud Inklusi Paud Masa Depan*, (Cakrawala Institute, Jogjakarta, 2011), 13

Mohammad Takdir Ilahi mengemukakan “melalui pendidikan inklusi, maka anak berkelainan di didik bersama-sama anak normal lainnya untuk mengoptimalkan segenap potensi dan keterampilan mereka dengan penuh kesungguhan”. Paradigma pendidikan inklusi tentu saja menjadi langkah progresif dalam menopang kemajuan pendidikan demi terciptanya keterbukaan dan sikap saling menghargai bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik.<sup>4</sup> Pendidikan inklusi diharapkan dapat memecahkan salah satu persolan dalam penanganan pendidikan bagi anak berkelainan selama ini.

Lebih lanjut Mohammad Takdir Ilahi menyatakan bahwa: Pendidikan inklusi memang mencerminkan pendidikan untuk semua tanpa terkecuali, dan dikatakan bahwa pendidikan inklusi sebagai konsep ideal dalam mereformasi sistem pendidikan yang cenderung diskriminatif terhadap anak yang berkebutuhan khusus, dalam upaya mengembangkan potensi dan menyelamatkan masa depan mereka dari diskriminasi pendidikan yang cenderung mengabaikan anak-anak yang berkebutuhan khusus.<sup>5</sup>

Menurut keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Inklusif adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan pada semua peserta didik baik itu peserta didik normal maupun peserta didik yang berkebutuhan khusus untuk mengikuti pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan yang sama. Pendidikan inklusi mempercayai bahwa semua anak berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik sesuai dengan usia atau

---

<sup>4</sup>Mohammad takdir ilahi, *Pendidikan Inklusif Konsep dan Aplikasi*, ((Ar-ruzz media, Depok, 2013), 20

<sup>5</sup>Mohammad takdir ilahi, *Pendidikan Inklusif Konsep dan Aplikasi*, (Ar-ruzz media, Depok, 2013), 24

perkembangannya, tanpa memandang derajat, kondisi ekonomi, atau kelainannya.

#### **b. Landasan Pendidikan Inklusif**

Pendidikan inklusif merupakan konsep ideal yang memberikan kesempatan dan peluang sepenuhnya kepada anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara.<sup>6</sup> Mereka adalah bagian dari anak yang dilindungi oleh undang-undang dan peraturan pemerintah, mereka memiliki hak yang sama sebagai warga negara republik Indonesia.<sup>7</sup> Penyelenggaraan pendidikan inklusif di dasarkan pada konsep keberagaman yang dimiliki oleh setiap manusia atau individu. Di dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif berpijak pada beberapa landasan hukum yaitu sebagai berikut:

##### 1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis pendidikan inklusi di Indonesia adalah Pancasila yang merupakan lima pilar sekaligus cita-cita yang disebut Bhineka Tunggal Ika.<sup>8</sup> Sebagai bangsa yang memiliki pandangan filosofis, penyelenggaraan pendidikan inklusif harus juga di letakkan secara sinergis dan tidak boleh bertentangan satu sama lain. Filosofi Bhineka Tunggal Ika mencerminkan bahwa di dalam diri manusia bersemayam potensi yang luar biasa.<sup>9</sup> Maka hal ini harus di wujudkan dalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan harus memungkinkan terjadinya pergaulan dan interaksi antar siswa yang beragam, termasuk interaksi

---

<sup>6</sup>Mohammad takdir ilahi, *Pendidikan Inklusif Konsep dan Aplikasi*, (Ar-ruzz media, Depok, 2013). 69

<sup>7</sup>Dedy Kustawan dan yani meimulyani, *mengenal pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus serta implementasinya*, (Luxio metro, jakarta, 2013), 15

<sup>8</sup>Sumiyati, *Paud Inklusi Paud Masa Depan*, Cakrawala Institute, Jogjakarta, 2011, 12

<sup>9</sup>Mohammad takdir ilahi, *Pendidikan Inklusif Konsep dan Aplikasi*, Ar-ruzz media, Depok, 2013., 73-74

antara peserta didik normal dan peserta didik yang membutuhkan khusus.

Menurut Dadang Garnida, secara filosofis, penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat di jelaskan sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dengan lambang negara burung garuda yang berarti *Bhineka Tunggal Ika*. Keragaman dalam etnik, dialek, adat istiadat, keyakinan, tradisi, dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan republik indonesia (NKRI).
  - b. Pandangan agama (khususnya islam) antara lain ditegaskan bahwa: (1) manusia di lahirkan dalam keadaan suci, (2) kemuliaan seseorang dihadapan Tuhan (Allah) bukan karena fisik tetapi taqwanya, (3) allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum kecuali kaum itu sendiri, (4) manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling silaturahmi (inklusif).
  - c. Pandangan universal Hak azasi manusia, menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup yang layak, hak pendidikan, hak kesehatan, hak pekerjaan.
2. Landasan Religius

Landasan religius juga termasuk salah satu landasan yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Sebagai bangsa yang beragama, penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak terlepas dari konteks agama karena pendidikan merupakan tangga utama dalam mengenal Tuhan (Allah).

Pendidikan di Indonesia adalah pendidikan yang di landaskan pada basis agama. Pengembangan pendidikan di Indonesia sejatinya haruslah berakar dari nilai-nilai (ideologi) dan budaya yang diyakini

---

<sup>10</sup>Dadang Garnida, *Pengantar Pendidikan Inklusif*, (PT Refika Aditama, Bandung, 2015), 44

mayoritas masyarakat.<sup>11</sup> Ada banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang landasan religius dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. Faktor religi yang di gunakan untuk penjelasan ini adalah Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 13 Allah Berfirman : Artinya:

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakankamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal, sesungguhnya orang yang paling muliadiantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”. (QS. Al-Hujurat:13)<sup>12</sup>

Ayat tersebut memberikan perintah kepada kita, agar saling ta'aruf, yaitu saling mengenal dengan siapapun, tidak memandang latar belakang sosial, ekonomi, ras, suku, bangsa, dan bahkan agama.<sup>13</sup>

Dalam QS.Al-Maidah:2, Allah SWT juga berfirman:

Artinya:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan”. (QS. Al-Maidah:2)

Ayat tersebut juga memberikan perintah kepada kita agar kita memberikan pertolongan

---

<sup>11</sup>Helmawati, *Pendidik Sebagai Model (Menjadikan Anak Sehat, Beriman, Cerdas, dan Berakhlak Mulia)*, (PT Rosdakarya, Bandung, 2016).69

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung, Gema Risalah Press, 1992), 110

<sup>13</sup>Mohammad takdir ilahi, *Pendidikan Inklusif Konsep dan Aplikasi*, (Ar-ruzz media, Depok, 2013), 76

kepada siapa saja, terutama kepada mereka yang membutuhkan, tanpa memandang latar belakang keluarga dan dari mana ia berasal. Lebih-lebih mereka yang mengalami keterbatasan atau kecacatan fisik, sebagai contoh tunanetra, tunadaksa, tunarungu, tuna grahita dan tunalaras.

### 3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis dalam pendidikan inklusif berkaitan langsung dengan hierarki, undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan direktur jenderal, hingga peraturan sekolah.<sup>14</sup> Landasan-landasan yuridis internasional penerapan pendidikan inklusif adalah *Deklarasi Salamanca* oleh para menteri pendidikan se-dunia.<sup>15</sup>

Menurut Dadang Garnida landasan Yuridis pendidikan inklusif yaitu:<sup>16</sup>

- a. UUD 1945 (Amandemen) Pasal 31
- b. UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
- c. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

### 4. Landasan Empiris

Penelitian tentang inklusif telah banyak dilakukan di negara-negara Barat sejak 1980-an. Namun penelitian yang berskala besar dipelopori oleh *The Nasional Academy Of Sciences* (Amerika Serikat).<sup>17</sup> Para peneliti merekomendasikan bahwa pendidikan khusus (inklusif) hanya diberikan terbatas berdasarkan hasil identifikasi yang tepat.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup>Mohammad takdir ilahi, *Pendidikan Inklusif Konsep dan Aplikasi*, (Ar-ruzz media, Depok, 2013), 77

<sup>15</sup>Sumiyati, *Paud Inklusi Paud Masa Depan*,(Cakrawala Institute, Jogjakarta, 2011). 11

<sup>16</sup>Dadang Garnida, *Pengantar Pendidikan Inklusif*,(PT Refika Aditama, Bandung, 2015),44-45

<sup>17</sup>Mohammad takdir ilahi, *Pendidikan Inklusif Konsep dan Aplikasi*, (Ar-ruzz media, Depok, 2013),79

<sup>18</sup>Sumiyati, *Paud Inklusi Paud Masa Depan*,(Cakrawala Institute, Jogjakarta, 2011). 13

Menurut Dadang Garnida landasan Empiris pendidikan inklusif sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Deklarasi Hak Asasi Manusia, 1948 (*Declaration of Human Rights*).
- b. Konvensi Hak Anak, 1989 (*Convention on the Rights of the child*).
- c. Konferensi dunia tentang Pendidikan untuk semua, 1990 (*World Conference on education for all*).
- d. Resolusi PBB Nomor 48 Tahun 96 tahun 1993 tentang persamaan kesempatan bagi orang berkelainan (*the standard rules on the equalization of opportunities for persons with disabilities*).
- e. Pernyataan salamanca tentang pendidikan inklusif, 1994 (*the salamanca statement on inclusive education*).
- f. Komitmen dakar mengenai pendidikan untuk semua, 2000 (*the Dakar commitment on education for all*).
- g. Deklarasi Bandung 2004 dengan komitmen *Indonesia menuju pendidikan inklusif*.
- h. Rekomendasi Bukittinggi (2005), bahwa pendidikan inklusif dan ramah terhadap anak seyogyanya di pandang sebagai:<sup>20</sup>
  1. Sebuah pendekatan terhadap peningkatan kualitas sekolah secara menyeluruh yang akan menjamin bahwa strategi nasional untuk pendidikan untuk semua adalah benar-benar untuk semua.
  2. Sebuah cara untuk menjamin bahwa semua anak memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas di dalam komunitas tempat tinggal sebagai bagian dari program-program untuk

---

<sup>19</sup>Dadang Garnida, *Pengantar Pendidikan Inklusif*, (PT Refika Aditama, Bandung, 2015), 46

<sup>20</sup>Dadang Garnida, *Pengantar Pendidikan Inklusif*, (PT Refika Aditama, Bandung, 2015), 46

perkembangan usia dini anak, prasekolah, pendidikan dasar dan menengah, terutama mereka yang pada saat ini masih belum diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan disekolah umum atau masih rentan terhadap marginalisasi dan eksklusi.

3. Sebuah kontribusi terhadap pengembangan masyarakat yang menghargai dan menghormati perbedaan individu semua warga negara.

### c. Tujuan Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif diselenggarakan dengan tujuan:

1. Terpenuhinya hak atas pendidikan yang layak dan memberikan akses seluas-luasnya bagi semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus.
2. Terwujudnya pemerataan penyelenggaraan sistem pembelajaran yang layak dan berkualitas sesuai dengan kondisi, potensi dan kebutuhan individu siswa.
3. Terwujudnya pembentukan manusia sosial yang menjadi bagian integral dalam keluarga, masyarakat dan bangsa.<sup>21</sup>

Sedangkan menurut Mohammad Takdir Illahi tentang tujuan pendidikan inklusif yaitu :

“memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Serta mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik”.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Sumiyati, *Paud inklusi Paud masa depan*, (Cakrawalainstitut, Yogyakarta, 2011). 20

<sup>22</sup> Mohammad takdir ilahi, *Pendidikan Inklusif Konsep dan Aplikasi*, ( Ar-ruzz media, Depok, 2013),39-40

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan inklusif pada hakikatnya adalah untuk memanusiakan manusia sebagai bentuk perlawanan terhadap sikap diskriminatif terhadap lembaga sekolah yang menolak menampung anak berkebutuhan khusus. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif terhadap semua peserta didik.

**d. Unsur-Unsur Pendidikan Inklusif**

Efektifitas keberhasilan program pendidikan inklusif sangat ditentukan oleh dukungan semua pihak, termasuk persamaan pandangan terhadap anak berkebutuhan khusus, yaitu antara pemerintah, guru, dan masyarakat. Unsur-unsur yang terkait dalam keberhasilan pendidikan inklusi akan menentukan setiap sistem pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

Adapun unsur-unsur Inklusif yaitu:<sup>23</sup>

1. Fleksibilitas kurikulum (bahan ajar)  
Yaitu dimana dalam pendidikan inklusif menggunakan kurikulum sekolah reguler yang telah dimodifikasi sesuai dengan tingkat ketunaan dan tahap perkembangan dari anak berkebutuhan khusus tersebut.
2. Tenaga pendidik (guru)  
Yaitu guru yang profesional dalam bidangnya masing-masing dalam mendidik anak berkebutuhan khusus.
3. Peserta didik  
Yaitu dimana kemampuan awal dan karakteristik siswa menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar.
4. Lingkungan dan penyelenggaraan sekolah inklusif  
Yang terdiri dari :

---

<sup>23</sup>Mohammad takdir ilahi, *Pendidikan Inklusif Konsep dan Aplikasi*, (Ar-ruzz media, Depok, 2013), 167-187

- a. Orang tua, dimana orang tua sangat menentukan kepercayaan diri dan motifasi anak.
  - b. Pemerintah, yang dituntut untuk membantu dalam merumuskan kebijakan-kebijakan internal sekolah, meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan melalui berbagai pelatihan, menyediakan subsidi, program pendamping, evaluasi program maupun sosialisasi ke masyarakat.
  - c. Masyarakat, yang diharap bisa memberikan perlakuan yang bisa menerima keberadaan nak berkebutuhan khusus.
5. Sarana prasarana  
Dapat memudahkan pelaksanaan setiap kegiatan anak berkebutuhan khusus.
  6. Evaluasi pembelajaran  
Bertujuan untuk melihat kemajuan dan prestasi belajar peserta didik dalam menguasai materi yang telah dipelajarinya.
- e. Fungsi Pendidikan Inklusif**  
Menjelaskan bahwa sesuai disiplin ilmu fungsi pendidikan inklusi dibagi menjadi tiga, yaitu:<sup>24</sup>
- a. Fungsi preventif  
Melalui pendidikan inklusi guru melakukan pencegahan agar tidak muncul hambatan-hambatan yang lainnya pada anak berkebutuhan khusus.
  - b. Fungsi intervensi  
Pendidikan inklusi menangani anak berkebutuhan khusus agar dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya.
  - c. Fungsi kompensasi  
Pendidikan inklusi membantu anak berkebutuhan khusus untuk menangani kekurangan yang ada pada dirinya dengan mengganti dengan fungsi lainnya.
- f. Model Sekolah Inklusi**

---

<sup>24</sup> Kustawan Dedy & Yani Meimulyani, *Mengenal Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus serta Implementasinya*, (Luxima Metro Media, Jakarta, 2013).20

Terdapat beberapa model sekolah inklusi yang ada di Indonesia berikut :<sup>25</sup>

- a. Kelas regular (inklusi penuh)  
Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal sepanjang hari di kelas regular dengan menggunakan kurikulum yang sama.
- b. Kelas regular dengan cluster  
Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas regular dalam kelompok khusus.
- c. Kelas regular dengan cluster dan pull out  
Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas regular dalam kelompok khusus , dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas regular ke kelas lain untuk belajar dengan guru pembimbing khusus.
- d. Kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian  
Anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah regular, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak normal di kelas regular.
- e. Kelas khusus penuh  
Anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah regular

**g. Konsep Pendidikan Inklusi**

konsep pendidikan inklusi merupakan konsep pendidikan yang mempresentasikan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan keterbukaan dalam penerimaan anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh hak dasar mereka sebagai warga Negara.<sup>26</sup>

Berikut adalah kosep dari pendidikan inklusi:

1. Konsep anak dan peran orang tua
2. Konsep sistem pendidikan dan sekolah
3. Konsep keberagaman dan diskriminasi
4. Konsep memajukan inklusi
5. Konsep sumber daya manusia

---

<sup>25</sup>I.P darma dan B. rusyid, *Pelaksanaansekolah Inklusi di Indonesia*, 2013, 226-227

<sup>26</sup>Mohammad takdir ilahi, *Pendidikan Inklusif Konsep dan Aplikasi*, ( Ar-ruzz media, Depok, 2013), 24

Sebagai bentuk tanggung jawab dalam pelaksanaan pendidikan inklusi, semua pihak baru berfikir keras untuk menghilangkan diskriminasi dan pengusilan yang menyudutkan anak berkebutuhan khusus dari lingkungan mereka tinggal karena pada dasarnya pendidikan inklusi dibuat agar dapat menghargai perbedaan-perbedaan.

#### **h. Prinsip Pendidikan Inklusif**

Mudjito dkk mengemukakan bahwa Pendidikan inklusif mempunyai prinsip-prinsip filosofis sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Semua anak mempunyai hak untuk belajar dan bermain bersama
2. Anak-anak tidak boleh direndahkan atau dibedakan berdasarkan keterbatasan atau kesulitan dalam belajar
3. Tidak ada satu alasanpun yang dapat dibenarkan untuk memisahkan anak selama ia sekolah. Anak-anak saling memilikibukan untuk dipisahkan satu dengan yang lainnya

Johnsen dan skojen dalam bukunya Budianto menjabarkan tiga prinsip dasar pendidikan inklusi yaitu sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Setiap anak termasuk dalam komunitas setempat dan dalam satu kelas atau kelompok
2. Hari sekolah diatur penuh dengan tugas-tugas pembelajaran kooperatif dengan perbedaan pendidikan dan kefleksibelan dalam memilih dengan puas hati
3. Guru bekerjasama dan mendapat pengetahuan pendidikan umum, khusus dan teknik belajar individu serta keperluan-keperluan pelatihan dan bagaimana mengapresiasi keanekaragaman dan perbedaan individu dalam pengorganisasikan kelas

Mulyono dalam bukunya Budianto juga telah mengidentifikasi prinsip-prinsip dalam pendidikan inklusif menjadi sembilan elemen dasar yang memungkinkan pendidikan inklusif dapat dilaksanakan:<sup>29</sup>

1. Sikap guru yang positif dalam kebinekaan

---

<sup>27</sup> Mudjito dkk, *Pendidikan inklusif*, (Badouse Media, Jakarta, 2012), 33

<sup>28</sup> Budianto, *pengantar Pendidikan Inklusif berbasis budaya lokal*, (departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2005), 41

<sup>29</sup> Budianto, *pengantar Pendidikan Inklusif berbasis budaya lokal* (departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2005).54

2. Interaksi promotif
3. Pencapaian potensi akademik dan sosial
4. Pembelajaran adaptif
5. Konsultasi kolaboratif
6. Hidup dan belajar dalam masyarakat
7. Hubungan kemitraan antara sekolah dengan keluarga
8. Belajar dan berfikir *independent*
9. Belajar sepanjang hayat

Dari beberapa uraian disimpulkan bahwa dalam prinsip-prinsip pendidikan inklusif semua peserta pendidikan mempunyai hak yang sama dalam bermain dan belajar bersama, mengapresiasi keanekaragaman dan perbedaan individu dalam pengorganisasian kelas.

**i. Karakteristik Pendidikan Inklusif**

Karakter utama pendidikan inklusi adalah keterbukaan dan memberikan kesempatan anak yang membutuhkan layanan pendidikan anti karakteristik yaitu:<sup>30</sup>

1. Proses yang berjalan terus dalam usahanya menemukan cara-cara merespon keragaman individu
2. Memperdulikan cara-cara untuk meruntuhkan hambatan-hambatan anak dalam belajar
3. Anak kecil yang hadir dalam sekolah berpartisipasi dan mendapatkan hasil belajar yang bermakna dalam hidupnya
4. Diperuntukkan utamanya bagi anak-anak yang tergolong marginal, eksklusif dan membutuhkan layanan pendidikan khusus

Peneliti berpendapat bahwa keterbukaan dan kesamaan adalah karakteristik utama pendidikan inklusi. Dalam sekolah inklusi siswa tidak boleh dibeda-bedakan dalam proses belajar mengajar karena hal ini bisa berdampak buruk bagi siswa. Selama memungkinkan dan bisa, semua anak seharusnya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka.

**j. Program Pendidikan Inklusi**

Dalam manajemen strategi inklusi paling sedikit mencakup tiga aspek yaitu perencanaan, penerapan, dan

---

<sup>30</sup>Mohammad takdir ilahi, *Pendidikan Inklusif Konsep dan Aplikasi*, (Ar-ruzz media, Depok, 2013).44

pengawasan. Pada aspek perencanaan diantaranya meliputi pengembangan visi misi dan tujuan sekolah yang disesuaikan dengan keadaan sekolah dan lingkungan sekitar.<sup>31</sup> Dalam penerapan poses pembelajaran sebaiknya perencanaan pembelajaran hendaknya dibuat berdasarkan hasil assesmen dan dibuat bersama antara guru pendamping khusus dan guru kelas dalam bentuk program pembelajaran individu, berikutnya pada pelaksanaan pembelajaran lebih mengutamakan metode pembelajaran kooperatif dan partisipatif, memberi kesempatan yang sama pada siswa lain, menjadi tanggung jawab bersama dan dilaksanakan secara kolaboratif antara guru pendamping khusus dan guru kelas, serta dengan menggunakan media, sumber daya dan lingkungan yang beragam sesuai kebutuhan anak berkebutuhan khusus.<sup>32</sup>

Lebih lanjut Sunaryo menyatakan bahwa dalam tahap evaluasi perlu penyesuaian cara, waktu dan isi kurikulum. Mengacu pada hasil asesmen, serta mempertimbangkan penggunaan penilaian, acuan, norma. pelaksanaan evaluasi sebaiknya secara fleksibel, multimetode, dan berkelanjutan. Selain itu guru harus secara rutin mengkomunikasikan hasilnya kepada orang tua.<sup>33</sup> Mengimplementasikan pendidikan inklusif banyak faktor-faktor yang harus dipertimbangkan antara lain yaitu:<sup>34</sup>

- a. Kebijakan hukum dan perundang-undangan
- b. Sikap, pengalaman, dan pengetahuan
- c. Tujuan pendidikan nasional dan kurikulum tingkat satuan pendidikan
- d. Perubahan paradigma pendidikan
- e. Adaptasi lingkungan
- f. Kerjasama kemitraan yang meliputi; pemerintah, sekoalh, orang tua, masyarakat

---

<sup>31</sup> Sukinah, *Manajemen Stretegi Implementasi Pendidikan Inklusif*, (Jurnal Pendidikan khusus, 2010), 43

<sup>32</sup> Sunaryo, manajemen pendidikan Inklusif (konseo,kebijakan,dan implementasi dalam prspektif pendidikan luar biasa).2009.7

<sup>33</sup> Sunaryo, manajemen pendidikan Inklusif (konseo,kebijakan,dan implementasi dalam prspektif pendidikan luar biasa).2009. 7

<sup>34</sup> Prastiyo, *Implentasi pendidikan Inklusif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, 4

## k. Peran Tenaga Pendidik Dalam Implementasi Pendidikan Inklusif

### 1. Peran kepala sekolah

Kepala sekolah merupakan pengurus dan pimpinan yang paling penting disekolah. Beberapa sifat utama kepala sekolah yang mempermudah keberhasilan sekolah dan kelas inklusif yaitu:<sup>35</sup>

- a. Kepala sekolah mengambil posisi yang jelas dan mendukung proses penerapannya yang merupakan kepercayaan dan nilai-nilai inklusi siswa-siswa penyandang hambatan
- b. Kepala sekolah memiliki pandangan, proaktif dan menunjukkan komitmen bagi nilai-nilai tersebut
- c. Pengharapan yang jelas dari kepala sekolah kepada guru dan siswa-siswa
- d. Kepala sekolah adalah komunikator yang baik
- e. Kepala sekolah menyiapkan guru-guru dengan waktu persiapan dan perencanaan yang memadai
- f. Kepala sekolah mendorong keterlibatan orang tua

### 2. Peran guru

Guru harus memiliki komitmen pada peserta didik pada proses pembelajarannya, guru harus memahami teknik evaluasi mulai dari pengamatan dalam perilaku siswa, sebagai guru juga harus memberikan motivasi agar peserta didik merasa percaya diri dengan kemampuan yang dimilikinya.<sup>36</sup> Sebagai guru di sekolah inklusif sikap merupakan hal yang penting untuk menunjang kinerja guru. Sikap menerima guru terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif dapat membantu anak yang berkebutuhan khusus untuk memperoleh hak dalam pendidikan sesuai kebutuhannya.

---

<sup>35</sup>Mohammad takdir ilahi, *Pendidikan Inklusif Konsep dan Aplikasi*, (Ar-ruzz media, Depok, 2013), 173

<sup>36</sup>Mohammad takdir ilahi, *Pendidikan Inklusif Konsep dan Aplikasi*, (Ar-ruzz media, Depok, 2013),181

Guru disekolah inklusif harus lebih terbuka terhadap perbedaan atau keberagaman peserta didik, mampu mendidik peserta didik yang beragam, lebih terbiasa dan terlatih untuk mengatasi tantangan pelajaran supaya siswa mendapatkan prestasi yang tinggi.<sup>37</sup> Berdasarkan hal tersebut bahwa setiap guru terhadap pendidikan inklusif menunjukkan sebagai seorang guru di sekolah inklusif harus memiliki komitmen untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik agar peserta didik percaya diri akan kemampuan yang dimilikinya, mampu mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran.

### 3. Peran Guru Pendamping Khusus

Guru pendamping khusus mempunyai tugas penting dalam pendampingan anak berkebutuhan khusus, mempunyai tugas dan peran dalam penyelenggaraan sekolah inklusi yang di jabarkan dalam permendiknas No.70 tahun 2009 yang meliputi:<sup>38</sup>

- a. Menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama-sama dengan guru kelas atau guru mata pelajaran
- b. Membangun sistem koordinasi antara guru, pihak sekolah dan orang tua peserta didik
- c. Melaksanakan pendampingan anak berkelainan pada kegiatan pembelajaran bersama-sama dengan guru kelas, guru mata pelajaran atau guru bidang studi
- d. Memberikan bantuan layanan khusus bagi anak-anak berkelainan yang mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan belajar di kelas umum, berupa remidi ataupun pengayaan
- e. Memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus kepada anak-anak berkelainan yang dapat dipahami jika terjadi pergantian guru

---

<sup>37</sup>Kustawan Dedy & Yani Meimulyani, *Mengenal Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus serta Implementasinya*, (Luxima Metro Media, Jakarta, 2013). 11

<sup>38</sup> Permendiknas, No70,2009

- f. Memberikan bantuan pada guru kelas dan guru mata pelajaran agar mereka dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak berkelainan

#### 1. Implementasi Pembelajaran Inklusif

Pada dasarnya manajemen pembelajaran inklusi juga sama dengan manajemen pembelajaran yang terjadi pada umumnya. Manajemen pembelajaran inklusi bagi anak berkebutuhan khusus tersebut terdiri atas proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Dalam hal ini tujuan yang ingin dicapai dalam manajemen pembelajaran inklusi ini bagi anak berkebutuhan khusus adalah terwujudnya pemerataan penyelenggaraan sistem pembelajaran yang layak dan berkualitas sesuai dengan kondisi, potensi dan kebutuhan individu siswa agar terbentuknya manusia sosial yang menjadi bagian integral dalam keluarga, masyarakat dan bangsa.

Berikut ini manajemen pembelajaran inklusi bagi anak berkebutuhan khusus yang meliputi:<sup>39</sup>

##### 1. Perencanaan program inklusi

Perencanaan merupakan proses dalam mengartikan seperti apa tujuan organisasi yang ingin dicapai, kemudian dari tujuan tersebut maka orang-orang didalamnya mesti membuat strategi dalam mencapai tujuan tersebut dan dapat mengembangkan suatu rencana aktifitas suatu kerja organisasi. Perencanaan dalam manajemen sangat penting karena inilah awalan dalam melakukan sesuatu.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif membutuhkan persiapan yang menyangkut permasalahan yang kompleks, meliputi sumber daya pendanaan, sumber daya manusia yang siap menjalankan tanggung jawab dalam proses penyelenggaraan pendidikan inklusif melalui penyediaan guru-guru yang memahami hakikat pendidikan tersebut.

---

<sup>39</sup>Sumiyati, *PAUD Inklusi PAUD Masa Depan*, (Jogjakarta: Cakrawala Institut, 2011). 37

Selain itu, lingkungan fisik dan sosial yang menunjang dibutuhkan demi tercapainya kelancaran kegiatan belajar.<sup>40</sup>

Perencanaan pembelajaran merupakan proses penetapan dan pemanfaatan sumber daya secara terpadu yang diharapkan dapat menunjang kegiatan-kegiatan dan upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan.<sup>41</sup> Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan meliputi; menganalisis hasil assessment untuk kemudian dideskripsikan, ditentukan penempatan untuk selanjutnya, dibuatkan program pembelajaran berdasarkan hasil asesment.

Dalam konteks perencanaan pembelajaran dapat diartikan sebagai proses penyusunan materi pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, dan penilaian dalam suatu lokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Perencanaan pembelajaran yang merupakan antisipasi dan perkiraan tentang apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran sehingga tercipta suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya proses belajar yang dapat mengantarkan peserta didik mencapai tujuan yang diharapkan. Apabila perencanaan pembelajaran disusun dengan baik, maka akan menjadikan tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Peran yang dilakukan oleh guru dalam perencanaan pembelajaran adalah dengan membuat perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran merupakan beberapa persiapan yang disusun oleh guru agar pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran dapat dilakukan secara sistematis dan memperoleh hasil seperti yang diharapkan. Perangkat pembelajaran tersebut minimal terdiri dari analisis pekan efektif, program tahunan,

---

<sup>40</sup> Titik Handayani dkk, *Perpu dan Implementasi Pendidikan Inklusif*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2013), 4

<sup>41</sup> Budiyanto, *Pengantar Pendidikan Inklusif berbasis Budaya Lokal*, (Depdiknas, Jakarta, 2005), 5

program semesteran, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan kriteria ketuntasan minimal (KKM)

## 2. Proses implementasi pendidikan inklusi

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dikelas inklusi secara umum sama dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas regular. Namun demikian, karena didalam kelas inklusif disamping terdapat anak normal terdapat pula anak berkebutuhan khusus yang mengalami kelainan atau penyimpangan (baik fisik,intelektual,sosial,emosional dan sensoris neurologis) dibanding anak normal, maka dalam kegiatan menggunakan strategi, media dan metode harus disesuaikan dengan masing-masing kelainan.<sup>42</sup>

Pada tahap ini guru melaksanakan program pembelajaran serta pengorganisasian siswa berkelainan dikelas regular sesuai dengan rancangan yang telah disusun. Pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan melalui individualisasi pengajaran, artinya anak belajar pada topik yang sama, waktu dan ruang yang sama, namun dengan materi yang berbeda-beda. Cara lain proses pembelajaran dilakukan secara individual artinya anak diberi layanan secara individual dengan bantuan guru khusus. Proses ini dapat dilakukan jika dianggap memiliki rentang materi/keterampilan yang sifatnya mendasar. Proses layanan ini dapat dilakukan secara terpisah atau masih dikeas tersebut sepanjang tidak mengganggu situasi belajar secara keseluruhan.<sup>43</sup>

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan , kegiatan inti dan kegiatan penutup.<sup>44</sup>

### a. Kegiatan pendahuluan

<sup>42</sup> Direktorat PLB. 2004. Hal: 28

<sup>43</sup> Budiyanto, *Pengantar Pendidikan Inklusif berbasis Budaya Lokal*, (Depdiknas, Jakarta, 2005), 31

<sup>44</sup> Ara Hidayat dan Imam, *Pengelolaan Pendidikan*, (Pustaka Educa, Bandung, 2010), 227-229

1. Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran
  2. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari
  3. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan di capai
  4. Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus
- b. Kegiatan inti
- Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
- Kegiatan ini menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.
- c. Kegiatan penutup
1. Bersama-sama dengan peserta didik membuat rangkuman
  2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram
  3. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran
  4. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remidi, program pengayaan, layanan konseling atau memberikan tugas, baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik
  5. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
3. Evaluasi
- Kemajuan belajar perlu dipantau untuk mengetahui apakah proses manajemen khusus yang diberikan berhasil

atau tidak. Apabila dalam kurun waktu tertentu anak tidak mengalami kemajuan yang berarti signifikan, maka perlu ditinjau kembali beberapa aspek yang berkaitan. Sebaliknya, apabila dengan program khusus yang diberikan anak mengalami kemajuan yang signifikan, maka program tersebut perlu diteruskan sambil memperbaiki atau menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada.

Evaluasi merupakan salah satu sistem komponen pembelajaran pada khususnya, dan sistem pendidikan pada umumnya. Artinya evaluasi merupakan suatu kegiatan yang tidak mungkin dielakkan dalam satu proses pembelajaran. Dengan kata lain, kegiatan evaluasi, baik evaluasi hasil belajar maupun evaluasi pembelajaran, merupakan bagian integral yang tidak terpisah dari kegiatan pendidikan. Dengan demikian evaluasi berarti penentuan nilai suatu program dan penentuan keberhasilan tujuan pembelajaran suatu program.<sup>45</sup>

Dalam evaluasi hendaknya mempertimbangkan sekurang-kurangnya 3 aspek yaitu siswa, program pembelajaran dan bagaimana pengadministrasian evaluasi itu sendiri. Evaluasi yang digunakan pada sekolah inklusi hendaknya menggunakan:<sup>46</sup>

- a. Untuk mereka yang berkebutuhan khusus maka evaluasi berdasarkan program pembelajaran individual
- b. Laporan hasil kemajuan siswa hendaknya dilengkapi dengan laporan berbentuk penjelasan atau informasi secara narasi
- c. Dalam mengevaluasi perlu mempertimbangkan kondisi atau jenis anak berkebutuhan khusus
- d. Untuk kondisi tertentu kemungkinan juga evaluasi menggunakan media gambar misalnya bagi mereka yang mengalami gangguan membaca

---

<sup>45</sup> Mukhtar, *Desain Pembelajaran PAI*, (CV Ikapi, Jakarta 2003), 147

<sup>46</sup> Direktorat PLB, 2005, 39

Dalam direktorat pendidikan luar biasa untuk evaluasi dalam program pembelajaran inklusi bagi anak berkebutuhan khusus berupa:<sup>47</sup>

- a. Penilaian selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, baik secara lisan , tertulis, maupun melalui pengamatan
- b. Melakukan tindak lanjut atau hasil penilaian yang telah dilakukan selama kegiatan belajar mengajar

## 2. Kurikulum Pendidikan Inklusi

### a. Pengertian Kurikulum

Istilah “kurikulum” memiliki berbagai tafsiran yang dirumuskan oleh pakar-pakar ahli dalam bidang pengembangan kurikulum sejak dulu sampai dengan sekarang. Tafsiran tersebut berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, sesuai dengan pandangan para pakar ahli.

Menurut Oemar Hamalik kurikulum adalah “suatu program pendidikan yang disediakan untuk pembelajaran siswa. Dengan program itu para siswa melakukan berbagai kegiatan belajar, sehingga terjadi perubahan dan perkembangan tingkah laku siswa, sesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran.”<sup>48</sup>

Sumiyati mendefinisikan kurikulum diartikan sebagai “seperangkat rencana atau pengaturan pelaksanaan pembelajaran atau pendidikan yang di dalamnya mencakup pengaturan tentang tujuan, isi, proses, serta evaluasi”.<sup>49</sup> Sedangkan menurut M. Zain mengatakan bahwa “kurikulum adalah segala kegiatan dalam pengalaman belajar yang di rencanakan dan diorganisir untuk dilakukan dan

---

<sup>47</sup> Direktorat PLB, 2004, 6

<sup>48</sup> Oemar Hamalik, *Kurikulum Dan Pembelajaran*, (Bumi Aksara, Jakarta, 2014). 18

<sup>49</sup>Sumiyati, *Paud Inklusi Paud masa depan*,(Cakrawala institut,Yogyakarta,2011),21

dialami oleh anak-anak didik agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.<sup>50</sup>

Hal ini mengandung pengertian bahwa kurikulum adalah suatu perangkat program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan yang diperuntukkan oleh peserta didik. Berdasarkan program pendidikan tersebut, peserta didik dapat melakukan berbagai macam kegiatan belajar, sehingga mampu mendorong pertumbuhan dan perkembangan mereka sesuai dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan.

#### **b. Perencanaan Kurikulum**

Merencanakan pada dasarnya merupakan suatu upaya dalam menentukan kegiatan yang hendak dilakukan pada masa depan, dan dimaksudkan untuk mengatur berbagai sumber daya yang ada agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Perencanaan juga sering disebut juga jembatan yang menghubungkan kesenjangan atau jurang antara keadaan masa kini dengan keadaan yang diharapkan terjadi pada masa yang akan datang, yang membutuhkan data dan informasi agar keputusan yang diambil tidak lepas kaitannya dengan masalah yang dihadapi pada masa yang akan datang. Perencanaan merupakan langkah awal dari proses pengelolaan, dan merupakan suatu tahapan yang sistematis dan teratur, yang menggambarkan proses pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan merupakan proses menentukan apa yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Syarifudin mengemukakan “dalam sebuah rencana tergambar tindakan-tindakan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup>Sumiyati, *Paud Inklusi Paud masa depan*,(Cakrawala institut,Yogyakarta,2011), 21

<sup>51</sup> Syarifudin, *Manajemen Pendidikan*,(Diadit Media, Jakarta, 2011), 93.

Adapun fungsi dari perencanaan itu sendiri adalah memberi arah, membuat standar kerja, membuat kerangka kerja, dan untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam mencapai tujuan. Kegiatan dari proses perencanaan itu sendiri meliputi apa yang hendak dicapai, bagaimana cara mencapai, siapa yang akan melaksanakan, kapan dapat dicapai, dan berapa biaya yang dibutuhkan. Perencanaan yang dibuat haruslah berpijak pada visi dan misi yang jelas, sehingga program-program yang dijadwalkan dibuat secara sistematis, sehingga dalam pelaksanaannya terdapat saling mempengaruhi dan menunjang untuk mencapai tujuan yang dikendaki.

Perencanaan kurikulum itu sendiri merupakan perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan telah terjadi pada diri siswa.<sup>52</sup> Definisi perencanaan kurikulum lebih komplek lagi dikemukakan oleh Hamalik “perencanaan kurikulum adalah suatu proses ketika peserta dalam banyak tingkatan membuat keputusan tentang tujuan belajar, cara mencapai tujuan tersebut melalui situasi mengajar belajar, serta penelaahan keefektifan dan kebermaknaan metode tersebut”.<sup>53</sup> Dalam tahap perencanaan kurikulum tersebut tentu diperlukan suatu langkah-langkah tertentu. Adapun langkah-langkah perencanaan tersebut menurut Rusman meliputi (1) analisis kebutuhan, (2) merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofis, (3) menentukan desain kurikulum, dan (4) membuat

---

<sup>52</sup> Rusman, *Manajemen Kurikulum*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009), 21.

<sup>53</sup> Hamalik, Oemar, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, (PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008), 171

rencana induk (master plan): pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian.<sup>54</sup>

**c. Pengorganisasian Kurikulum**

Pelaksanaan kurikulum pendidikan inklusi perlu dikoordinasikan agar tidak terjadi tumpang tindih dan kekacauan. Pengkoordinasian memungkinkan pelaksanaan kurikulum pendidikan inklusi dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Menurut Hikmat “Pengorganisasian adalah suatu proses menghubungkan orang-orang yang terlibat dalam organisasi pendidikan dan menyatupadukan tugas serta fungsinya dalam sistem jaringan kerja yang *relationship* antara satu dan yang lainnya”.<sup>55</sup>

Pengorganisasian adalah suatu proses dalam mengatur, mengalokasikan dan mendistribusikan pekerjaan, wewenang, dan sumberdaya diantara beberapa anggota organisasi, dengan cara terstruktur dalam rangka mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Pada tahap pengorganisasian ini merupakan tahap yang perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh Kepala Sekolah beserta tim yang telah dibentuk untuk memudahkan pembagian tugas sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pada tahap ini dapat pula dikatakan sebagai suatu proses dalam memilih orang-orang serta mengalokasikan sarana dan prasarana penunjang tugas dari orang-orang yang telah dipilih tersebut, mengatur mekanisme kerja sehingga dapat menjamin terlaksananya program dan tercapainya tujuan organisasi itu. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pengorganisasian ini antara lain adalah: (1) menentukan sumberdaya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, (2) merancang dan mengembangkan kelompok kerja

---

<sup>54</sup> Rusman, *Manajemen Kurikulum*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009), 128.

<sup>55</sup> Hikmat, *Manajemen Pendidikan*, (CV Pustaka Setia, Bandung, 2011), 118.

yang berisi orang-orang yang mampu membawa organisasi pada tujuan, (3) menugaskan seseorang atau kelompok orang dalam satu tanggung jawab tugas dan fungsi tertentu, dan (4) mendelegasikan wewenang kepada individu yang berhubungan dengan keleluasaan melaksanakan tugas.<sup>56</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, maka pengorganisasian merupakan suatu kegiatan dalam usaha menmpersatukan seluruh rangkaian aktifitas penyelenggaraan pendidikan dengan jalan menyatupadukan dan menyelaraskan orang-orang dan pekerjaannya, sehingga semuanya dapat berlangsung secara tertib menuju tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

#### **d. Pelaksanaan Kurikulum**

Pelaksanaan tidak lain adalah implementasi dari penyelenggaraan pendidikan, yang telah direncanakan dan diawaki oleh organisasi penyelenggara pendidikan dengan memperhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam perencanaan dalam rangka mencapai hasil yang optimal, dan wajib ditaati oleh anggota organisasi. Dalam setiap pelaksanaan diarahkan secara sinergis pada tujuan yang ditargetkan, sehingga evaluasinya akan mudah dilaksanakan. Pelaksanaan kurikulum itu sendiri merupakan manifestasi dari upaya untuk mewujudkan kurikulum yang masih bersifat dokumen tertulis menjadi aktual dalam serangkaian aktivitas pembelajaran.<sup>57</sup>

Rusman dalam tahap pelaksanaan ini langkah-langkah yang perlu diperhatikan adalah: (1) penyusunan rencana dan program pembelajaran (silabus, RPP), (2) penjabaran materi, (3) penentuan

---

<sup>56</sup> Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, (*Manajemen Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2013), 94.

<sup>57</sup> Rusman, *Manajemen Kurikulum*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009), 74.

strategi dan metode pembelajaran, (4) penyediaan sumber, alat, dan sarana pembelajaran, (5) penentuan cara dan alat penilaian proses dan hasil belajar, dan (6) setting lingkungan belajar.<sup>58</sup>

Pelaksanaan rencana disusun dan diimplementasikan secara bertahap, mulai dari skala kecil dan pembagian tugas secara merata sesuai dengan kapasitas dan kemampuan setiap personil. Menurut Hisbarnanto, selama melaksanakan rencana harus dilakukan pengendalian sebagai berikut: (1) mengumpulkan data dan informasi dasar tentang jalannya proses yang sedang berlangsung, (2) melakukan perubahan yang dikehendaki agar dapat diterapkan sesuai dengan keadaan yang ada.<sup>59</sup>

Dalam proses pelaksanaan ini, peran pimpinan/Kepala Sekolah dan guru sangatlah penting. Kepala Sekolah harus mampu memberikan petunjuk bagaimana tugas-tugas harus dilaksanakan, memberikan bimbingan dalam rangka perbaikan cara bekerja, dan mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan instruksi-instruksi yang telah diberikan agar tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan guru berperan sebagai pemegang kunci dalam pelaksanaan dan keberhasilan kurikulum, karena gurulah yang bertindak sebagai perencana, pelaksana, penilai, dan pengembang kurikulum yang sebenarnya.

#### e. **Evaluasi Kurikulum**

Evaluasi merupakan suatu fungsi dan prinsip pengelolaan untuk mengetahui apakah suatu program organisasi sudah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan atautkah tidak,

---

<sup>58</sup> Rusman, *Manajemen Kurikulum*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009), 128.

<sup>59</sup> Hisbarnanto & Yakub Vico, *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*, (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014), 89.

menilai semua kegiatan untuk menemukan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian tujuan, sehingga dapat dijadikan bahan kajian selanjutnya. Proses evaluasi ini harus didasarkan pada data dan fakta, karena akan memberikan informasi yang sebenarnya dibutuhkan demi kelanjutan suatu organisasi. Dengan mengetahui kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan, perbaikan dan pencarian solusi yang tepat dapat ditemukan dengan mudah. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kurikulum dilaksanakan dan kesesuaiannya dengan kerangka dasar, fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional serta kesesuaiannya dengan tuntutan perkembangan jaman. Adapun tujuan utama dari evaluasi kurikulum itu sendiri adalah memberikan informasi terhadap pembuat keputusan, atau untuk proses menggambarkan hasil, dan memberikan informasi yang berguna untuk membuat pertimbangan berbagai alternatif keputusan. Hopkins dan Antes dalam Rusman mengemukakan bahwa:

evaluasi kurikulum adalah proses terus menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, dan proses belajar mengajar untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektifitas program. Pendapat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa dalam proses evaluasi kurikulum itu yang menjadi kajian meliputi perkembangan siswa, kinerja guru, program pendidikan yang sedang dilaksanakan, dan juga kegiatan belajar mengajar.<sup>60</sup>

Tahap evaluasi program pendidikan oleh Arikunto dan Safruddin meliputi: (1) tahap persiapan

---

<sup>60</sup> Rusman, *Manajemen Kurikulum*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009). 93.

evaluasi program pendidikan, (2) tahap pelaksanaan evaluasi program pendidikan, dan (3) tahap monitoring pelaksanaan program pendidikan. Sedangkan lingkup evaluasi kurikulum mencakup tingkat pencapaian perkembangan dari peserta didik itu sendiri.<sup>61</sup>

#### f. Kurikulum Inklusi

Kurikulum adalah program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan bagi peserta didiknya dalam melakukan berbagai kegiatan belajar, sehingga mampu mendorong perkembangan dan pertumbuhan mereka sesuai dengan tujuan lembaga yang telah ditetapkan sebelumnya. Kurikulum pada dasarnya adalah wewenang dari Kementerian Pendidikan Nasional, baik itu penyusunan, pengembangan, maupun pembaharuan secara berkala, namun, seiring berkembangnya jaman, dimana banyak bermunculan sekolah-sekolah swasta, maka peran itu mulai bergeser, dimana kurikulum yang ada pada sekolah-sekolah tersebut akan mempunyai bentuk tersendiri, sesuai dengan visi dan misi yang ada pada sekolah tersebut. Kurikulum nasional berfungsi sebagai acuan (rujukan), dan pengembangannya tergantung pada masing-masing lembaga/ sekolah, yang akan menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara memasukkan muatan lokal di dalam kurikulum yang digunakan. Suyadi mengemukakan bahwa:

Kurikulum merupakan seperangkat panduan yang mengatur isi program dan proses pendidikan, sebagai acuan dalam proses pembelajaran dan penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum juga dapat diartikan sebagai seperangkat rencana atau pengaturan pelaksanaan pembelajaran atau pendidikan yang didalamnya mencakup pengaturan tentang tujuan, isi, proses, serta evaluasi.<sup>62</sup>

Dalam melakukan pengembangan kurikulum, ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan, yaitu: (1)

<sup>61</sup> Arikunto, Safrudin, *Manajemen Penelitian*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2012), 108.

<sup>62</sup> Suyadi, *Manajemen Pendidikan*, (Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2011), 19.

Tujuan Kurikulum, (2) Materi Kurikulum, (3) Metode, (4) Organisasi Kurikulum, (5) Evaluasi, Adapun langkah yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kurikulum itu sendiri adalah sebagai berikut: (1) Merumuskan Tujuan Pendidikan, (2) Menyusun Pengalaman Belajar, (3) Mengelola Pengalaman Belajar.<sup>63</sup>

Agar kurikulum dapat dikelola secara efektif dan efisien sehingga mampu mengantarkan tujuan kelembagaan, maka dalam pengelolaan kurikulum harus berpegang pada prinsip-prinsip manajemen kurikulum, yaitu : (1) Bersifat komprehensif, yang artinya kurikulum harus menyediakan pengalaman belajar yang meningkatkan perkembangan anak secara menyeluruh dalam berbagai aspek perkembangan, (2) Dikembangkan atas dasar perkembangan secara bertahap, didasarkan pada usia dan tahapan perkembangan setiap anak, (3) Melibatkan orang tua, dimana orang tua adalah pendidik utama bagi anak, sehingga peran orang tua dalam pendidikan anak usia dini sangat penting, (4) Melayani kebutuhan individu anak, yang berarti kurikulum harus dapat mawadahi kemampuan, kebutuhan, dan minat setiap anak didik, (5) Merefleksikan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat. Kurikulum harus memperhatikan kebutuhan setiap anak sebagai anggota dari keluarga dan nilai-nilai budaya suatu masyarakat, (6) Mengembangkan standar kompetensi anak, sebagai acuan dalam menyiapkan lingkungan belajar anak, (7) Mewadahi layanan anak berkebutuhan khusus, (8) Menjalin kemitraan dengan keluarga dan masyarakat, (9) Memperhatikan kesehatan dan keselamatan anak, (10) Menjabarkan prosedur pengelolaan lembaga, (11) Menggambarkan proses manajemen pembinaan sumber daya manusia yang terlibat dilembaga, (12) Dapat menggambarkan penyediaan sarana dan prasarana yang dimiliki lembaga. Kurikulum yang dikelola dengan baik akan mudah dievaluasi, dan hasil evaluasi

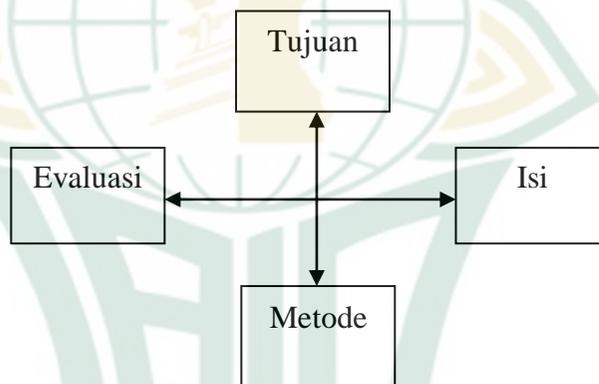
---

<sup>63</sup> Arifin,Zaenal,*Pengembangan manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan Islam*,(Diva Press,Jogjakarta,2012). 44-48.

tersebut akan dipakai sebagai pertimbangan dalam pengembangan kurikulum.<sup>64</sup>

Adapun komponen-komponen dari kurikulum itu sendiri ada 4 (empat) macam, yaitu:<sup>65</sup> (1) komponen tujuan, yang berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin diharapkan, (2) komponen isi/materi pembelajaran, (3) komponen metode, yang berkaitan dengan strategi yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan, dan (4) komponen evaluasi, meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi.

Komponen-komponen tersebut dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:



**Gambar 2.1.**  
**Sistem Kurikulum**

Kurikulum pendidikan inklusi pada dasarnya menganut *fleksibel curriculum*, dimana kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik, dan dibuat dengan karakteristik dari sekolah penyelenggara itu sendiri, tanpa mengesampingkan pedoman yang telah ada. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum pendidikan inklusi itu sendiri hendaknya menumbuhkan kemandirian,

<sup>64</sup> Suyadi, *Manajemen Pendidikan*, (Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2011), 210.

<sup>65</sup> Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (PT Bumi Aksara, Jakarta, 2014) . 23-29.

kritis, dan dapat membangkitkan nilai-nilai kebersamaan dalam lingkungan sekolah. Kurikulum hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan anak, tidak seperti yang terjadi selama ini, dimana anak dipaksakan mengikuti kurikulum. Adapun kurikulum yang sesuai dengan pendidikan inklusi adalah kurikulum yang dimodifikasi, yaitu kurikulum anak normal (reguler) yang disesuaikan (dimodifikasi sesuai) dengan kemampuan awal dan karakteristik siswa berkebutuhan khusus.<sup>66</sup>

Prinsip-prinsip penyesuaian kurikulum dalam sistem pendidikan inklusi untuk anak berkebutuhan khusus adalah sebagai berikut: (1) Menggunakan kurikulum reguler untuk pembelajaran bagi peserta didik yang mampu mengikuti materi kurikulum reguler, (2) Sebagian menggunakan kurikulum reguler, dan sebagian lagi menggunakan kurikulum yang telah disesuaikan untuk pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus, (3) Penyesuaian kurikulum dan materi pembelajaran untuk peserta didik yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata atau berbakat dilakukan dengan cara menambah indikator, materi pokok dengan materi untuk kelas berikutnya, menggunakan sepenuhnya materi dari kelas berikutnya, (4) Penyesuaian kurikulum dan materi pembelajaran untuk peserta didik yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata dilakukan dengan cara memperpanjang waktu pembelajaran, menyederhanakan atau mengurangi materi pokok, (5) Penyusunan kurikulum dilakukan oleh guru kelas, bersama-sama dengan GPK, peserta didik berkebutuhan khusus, orang tua ABK, dan Kepala Sekolah, (6) Memperhatikan potensi dan kondisi lingkungan alam dan masyarakat sekitar untuk dapat digunakan sebagai tempat materi atau sumber dan media atau alat pembelajaran.

Modifikasi tersebut dapat dilakukan dengan cara modifikasi alokasi waktu, modifikasi isi/materi, modifikasi

---

<sup>66</sup> Mohammad Takdir Ilahi, *Pendidikan inklusif Konsep dan Aplikasi*, (Jogjakarta, Ar-ruzz Media, 2013),171.

proses belajar mengajar, modifikasi sarana dan prasarana, modifikasi lingkungan untuk belajar, dan modifikasi pengelolaan kelas. Kurikulum pada pendidikan inklusi hendaknya memberikan peluang terhadap tiap anak untuk mengaktualisasikan potensinya sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing. Disamping guru kelas dan guru pendamping khusus (GPK), dalam penyusunan kurikulum pendidikan inklusi ini, orang tua hendaknya turut dilibatkan dalam proses perencanaannya.<sup>67</sup>

**g. Kurikulum Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)**

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) perlu memerlukan pelayanan pendidikan secara khusus. Hal ini dikarenakan mengingat mereka memiliki hambatan internal antara lain fisik, kognitif dan sosial emosional. Pendidikan bagi anak tersebut dapat dilakukan baik dalam sistem segregatif di sekolah luar biasa (SLB) maupun sistem inklusif pada sekolah umum / regular yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Kategori ABK disini adalah peserta didik yang mengalami hambatan visual impairments, hearing impairment, mental retardation, physical and health disabilities, communication disorders, slow learner, learning disabilities, gifted and talented, ADHD, autis dan multiply. Pendidikan inklusif memiliki ciri-ciri antara lain :<sup>68</sup>

1. ABK belajar bersama-sama dengan anak rata-rata lainnya.
2. Setiap anak memperoleh layanan pendidikan yang layak, menantang dan bermutu.
3. Setiap anak memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya.
4. Sistem pendidikan menyesuaikan dengan kondisi anak.

---

<sup>67</sup> Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, (*Manajemen Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2013), 193.

<sup>68</sup> Asruly Wulandari, "Model dan Kurikulum Pendidikan Inklusi", diakses dari <https://asrulywulandari.wordpress.com/2013/06/05/model-dan-kurikulum-pendidikan-inklusif/amp/>, pada tanggal 7 Desember 2017 pukul 22.33.

Pendidikan inklusi memiliki keuntungan antara lain :

1. Dapat memenuhi hak pendidikan bagi semua orang (education for all)
2. Mendukung proses wajib belajar
3. Pembelajaran emosi social spiritual bagi anak rerata lainnya
4. Pendidikan ABK lebih efisien.

Dalam pembelajaran inklusif, model kurikulum bagi ABK dapat dikelompokkan menjadi empat, yakni :<sup>69</sup>

1. Duplikasi Kurikulum  
Yakni ABK menggunakan kurikulum yang tingkat kesulitannya sama dengan siswa rata-rata/ reguler. Model kurikulum ini cocok untuk peserta didik tunanetra, tunarungu wicara, tunadaksa dan tunalaras. Alasannya peserta didik tersebut tidak mengalami hambatan intelegensi. Namun demikian perlu memodifikasi proses, yakni peserta didik tunanetra menggunakan huruf Braille dan tunarungu wicara menggunakan bahasa isyarat dalam penyamaannya.
2. Modifikasi Kurikulum  
Yakni kurikulum siswa rata-rata/ reguler disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan/ potensi ABK. Modifikasi kurikulum ke bawah diberikan kepada peserta didik tunagrahita dan modifikasi kurikulum ke atas (esklasi) untuk peserta didik giften and talented.
3. Subtitusi Kurikulum  
Yakni beberapa bagian kurikulum anak rata-rata ditiadakan dan diganti dengan yang kurang lebih setara. Model kurikulum ini untuk ABK dengan melihat situasi dan kondisinya.
4. Omisi Kurikulum  
Yaitu bagian dari kurikulum umum untuk mata pelajaran tertentu ditiadakan total. Karena tidak memungkinkan bagi anak ABK untuk dapat berfikir setara dengan anak rata-rata.

---

<sup>69</sup> Salamah,Umi,*Pengembangan Model Pengelolaan Kurikulum Pendidikan Inklusif Pada SD Negeri Pekauman 8 Kota Tegal*,Tesis(Program Pascasarjana Unnes),Semarang,34.

### 3. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

#### a. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus

Anak berkebutuhan khusus (heward) adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidak mampuan mental, emosi atau fisik.<sup>70</sup> Anak berkebutuhan khusus dapat diartikan sebagai seorang anak yang memerlukan pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing anak secara individual. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara pendidikan memerlukan layanan yang spesifik yang berbeda pada anak-anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus ini memiliki apa yang disebut dengan hambatan belajar dan hambatan perkembangan (*barier to learning and development*). Oleh sebab itu mereka memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang dialami oleh masing-masing anak.

Anak berkebutuhan khusus sering terlihat berbeda baik secara fisik maupun mental dan sosial emosional. Mereka memiliki karakteristik khusus yang mengakhibatkan adanya penyesuaian-penyesuaian di berbagai bidang, agar mereka tetap mendapatkan haknya yang sama dengan anak lain dan bahkan penyesuaian tersebut harus dapat mengoptimalkan perkembangannya sebagaimana layaknya anak-anak yang lain. Penyesuaian yang dimaksud adalah penyesuaian lingkungan yang dapat mengakomodasi kebutuhan semua anak, penyesuaian kemampuan, ketrampilan dan pengetahuan pendidik, penyesuaian kegiatan pembelajaran dan kurikulum, penyesuaian sarana

---

<sup>70</sup> Dedy kustawan dan yani meimulyani, *Mengenal Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Serta Implementasinya*, (Luxima Metro Media, Jakarta), 28.

dan prasarana pembelajaran, dan penyesuaian teman-teman sebaya serta lingkungan masyarakat sekitar.<sup>71</sup>

Dengan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki perbedaan dengan anak-anak secara umum atau rata-rata anak sesuainya. Anak dikatakan berkebutuhan khusus jika ada sesuatu yang kurang atau bahkan lebih dalam dirinya.

#### **b. Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus dalam pendidikan**

Dalam pendidikan inklusi setiap anak memiliki karakter dan kebutuhan khusus yang berbeda-beda. Konsep anak dalam pendidikan berkebutuhan khusus yaitu sebagai berikut:<sup>72</sup>

1. Anak yang memiliki kelainan atau kebutuhan khusus yang bersifat sementara atau temporer biasanya anak mengalami hambatan belajar dan perkembangan yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Hambatan belajar pada anak jenis ini dapat disembuhkan jika orang tua atau pendidik mampu memberikan terapi penyembuhan secara berkala
2. Anak memiliki kelainan atau kebutuhan khusus yang bersifat permanen atau tetap. Biasanya anak mengalami hambatan belajar dan perkembangan karena bawaan dari lahir atau kecelakaan yang berdampak permanen atau tidak dapat disembuhkan lagi. Contohnya: tunarungu, tunadaksa, tunanetra, tunagrahita, autisme, jenis anak berkebutuhan khusus ini perlu dilakukan pendampingan dan perhatian penuh agar bisa mengatasi hambatan belajar dan perkembangan jiwa

#### **c. Karakteristik Akademik Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi**

Mengajar disekolah inklusi berbeda dengan mengajar disekolah reguler yang semua siswanya berasal dari kalangan

---

<sup>71</sup> PAUDNI (Direktorat Jendral PAUDNI), *Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus*, Jakarta, 2011. 60.

<sup>72</sup> Mohammad takdir ilahi, *Pendidikan Inklusif Konsep dan Aplikasi*, (Ar-ruzz media, Depok, 2013), 138

anak normal. Perlu adanya penyesuaian kurikulum bagi anak berkebutuhan khusus yang sekolah disekolah regular berbasis inklusi guna menunjang prestasi akademiknya.

Berdasarkan prosedur operasional standar pendidikan inklusi direktorat Pembinaan sekolah Luar Biasa Direktorat jendral Manajemen Pendidikan dasar dan Menengah Departemen pendidikan nasioanal. Rung lingkup manajemen sekolah dalam rangka pendidikan inklusi sekurang-kurangnya mencakup:<sup>73</sup>

- a. Pengelolaan peserta didik
- b. Pengelolaan kurikulum
- c. Pengelolaan pembelajaran
- d. Pengelolaan penilaian
- e. Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan
- f. Pengelolaan sarana prasarana
- g. Pengelolaan pembiayaan
- h. Pengelolaan sumber daya masyarakat

Didalam pelaksanaan pendidikan inklusi perlu adanya delapan ruang lingkup manajemen sekolah agar pendidikan inklusi bisa terlaksana sesuai dengan tujuan.

#### **d. Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)**

##### **1. Pengertian Pendidikan Agama Islam (PAI)**

Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-Undang. Menurut para penyusun, yang dimaksud dengan satu sistem pengajaran nasional adalah suatu system pendidikan dan pengajaran yang memelihara pendidikan kecerdasan akal budi secara merata kepada seluruh rakyat Indonesia, yang bersendi agama dan kebudayaan bangsa, untuk mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan masyarakat bangsa Indonesia seluruhnya. Dikuatkan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 Bab II Pasal menyebutkan bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan

---

<sup>73</sup> Direktorat PLB, 2007, 17

manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani. dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.<sup>74</sup>

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, merupakan Undang-Undang yang mengatur penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional sebagaimana dikehendaki UUD 1945, melalui proses yang melelahkan, sejak Indonesia merdeka hingga tahun 1989 dengan kelahiran UU Nomor 2 Tahun 1989, dan kemudian disempurnakan menjadi UU Nomor 20 Tahun 2003, merupakan puncak dari usaha mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. Dengan demikian berarti UU Nomor 20 Tahun 2003 merupakan wadah formal terintegrasikan pendidikan Islam dalam sistem Pendidikan Nasional, dan dengan adanya wadah tersebut, pendidikan Islam mendapatkan peluang serta kesempatan untuk terus dikembangkan. Karena pendidikan Islam secara terintegrasi dalam sistem Pendidikan Nasional tersebut dapat dilihat pada pasal-pasal UU Nomor 2003 , seperti berikut ini. Di dalam Pasal 1 ayat (2), disebutkan bahwa Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman, tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan Islam, baik sebagai sistem maupun institusinya, merupakan warisan budaya bangsa yang berarti berakar pada masyarakat bangsa Indonesia, dengan demikian jelas bahwa pendidikan Islam akan merupakan bagian integral dari sistem Pendidikan Nasional. Secara terminologis Pendidikan Agama Islam berorientasi tidak

---

<sup>74</sup> Kartino Kartono, *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional*, (Pradnya Paramita, Jakarta, 1997)), 83

hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan agama yang sifatnya Islamologi, melainkan lebih menekankan aspek mendidik dengan arah pembentukan pribadi Muslim yang ta'at, berilmu dan beramal shalih.<sup>75</sup>

Pendidikan Agama Islam yaitu usaha yang lebih khusus ditekankan untuk mengembangkan fitrah keberagamaan dan sumber daya insani lainnya agar lebih mampu memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran islam. Pendidikan Agama Islam merupakan komponen yang tak terpisahkan dari pendidikan Islam yang jangkauan dan sasarannya lebih luas, namun berfungsi sangat strategi untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam fungsi disiplin ilmu yang dipelajari oleh subyek didik.<sup>76</sup>

Kekhususan Pendidikan Agama Islam ini dapat ditinjau baik dari tujuan maupun materi yang diajarkan hal ini tampak dalam penjelasan pasal 39.Undang-Undang RI No 2 Tahun 1989 tentang pendidikan agama.Pendidikan agama merupakan usaha untuk memperkuat iman dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai yang dianut oleh peserta didik yang bersangkutan.Hal ini berarti tujuan dan materi yang diajarkan disesuaikan dengan ajaran Islam, sehubungan dengan itu tujuan pendidikan agama Islam berintikan tiga aspek yaitu iman, ilmu dan amal.<sup>77</sup>

Adapun Pendidikan Agama Islam mempunyai fungsi yang berbeda dari subyek pelajaran yang lain. Ia dapat memiliki fungsi yang bermacam-macam, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing lembaga pendidikan. Fungsi yang diemban olehnya akan menentukan berbagai aspek pengajaran yang dipilih oleh

---

<sup>75</sup> Ahmadi, *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*, (Aditya Media, Semarang,2004). 103

<sup>76</sup> Ahmadi, *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*, (Aditya Media, Semarang,2004). 103

<sup>77</sup> Ahmadi, *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*, (Aditya Media, Semarang,2004). 103

pendidik agar tujuan tercapai. Secara umum, Pendidikan Agama Islam dapat diarahkan untuk mengemban salah satu atau gabungan dari beberapa fungsi, yaitu konfesional, neo konfesional, konfesional tersembunyi, implisit, dan non konfesional. Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, ajaran agama Islam, dibarengi dengan tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunannya antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.

## 2. Metode Pendidikan Agama Islam (PAI)

Pembelajaran sebagai suatu proses kegiatan, terdiri atas tiga fase atau tahapan. Fase-fase proses pembelajaran yang dimaksud meliputi: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Adapun dari ketiganya ini akan dibahas sebagaimana berikut.<sup>78</sup>

### a) Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Kegiatan pembelajaran yang baik senantiasa berawal dari rencana yang matang. Perencanaan yang matang akan menunjukkan hasil yang optimal dalam pembelajaran. Perencanaan merupakan proses penyusunan sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pelaksanaan perencanaan tersebut dapat disusun berdasarkan kebutuhan dalam jangka tertentu sesuai dengan keinginan pembuat perencanaan. Namun yang lebih utama adalah perencanaan yang dibuat harus dapat dilaksanakan dengan mudah dan tepat sasaran. Begitu pula dengan perencanaan pembelajaran, yang direncanakan harus sesuai dengan target pendidikan.

---

<sup>78</sup> Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, (Kencana, Jakarta: 2004), 112

Guru sebagai subjek dalam membuat perencanaan pembelajaran harus dapat menyusun berbagai program pengajaran sesuai pendekatan dan metode yang akan digunakan.<sup>79</sup> Dalam konteks desentralisasi pendidikan seiring perwujudan pemerataan hasil pendidikan yang bermutu, diperlukan standar kompetensi mata pelajaran yang dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks lokal, nasional dan global. Secara umum guru itu harus memenuhi dua kategori, yaitu memiliki capability dan loyalty, yakni guru itu harus memiliki kemampuan dalam bidang ilmu yang diajarkannya, memiliki kemampuan teoritik tentang mengajar yang baik, dari mulai perencanaan, implementasi sampai evaluasi, dan memiliki loyalitas keguruan, yakni loyal terhadap tugas-tugas keguruan yang tidak semata di dalam kelas, tapi sebelum dan sesudah kelas. Beberapa prinsip yang perlu diterapkan dalam membuat persiapan mengajar :

- 1) Memahami tujuan pendidikan.
- 2) Menguasai bahan ajar.
- 3) Memahami teori-teori pendidikan selain teori pengajaran.
- 4) Memahami prinsip-prinsip mengajar.
- 5) Memahami metode-metode mengajar.
- 6) Memahami teori-teori belajar.
- 7) Memahami beberapa model pengajaran yang penting.
- 8) Memahami prinsip-prinsi evaluasi.
- 9) Memahami langkah-langkah membuat lesson plan.

---

<sup>79</sup> Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, (Kencana, Jakarta: 2004), 112

Langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam pembelajaran adalah sebagai berikut :<sup>80</sup>

1) Analisis Hari Efektif dan analisis Program Pembelajaran

Untuk mengawali kegiatan penyusunan program pembelajaran, guru perlu membuat analisis hari efektif selama satu semester. Dasar pembuatan analisis hari efektif adalah kalender pendidikan dan kalender umum. Berdasarkan analisis hari efektif tersebut dapat disusun analisis program pembelajaran.

2) Membuat Program Tahunan, Program Semester dan Program Tagihan

(a) Program Tahunan

Penyusunan program pembelajaran selama tahun pelajaran dimaksudkan agar keutuhan dan kesinambungan program pembelajaran atau topik pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam dua semester tetap terjaga.

(b) Program Semester

Penyusunan program semester didasarkan pada hasil analisis hari efektif dan program pembelajaran tahunan.

(c) Program Tagihan

Sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran, tagihan merupakan tuntutan kegiatan yang harus dilakukan atau ditampilkan siswa. Jenis tagihan dapat berbentuk ujian lisan, tulis, dan penampilan yang berupa kuis, tes lisan, tugas individu, tugas kelompok, unjuk kerja, praktek, penampilan, atau porto folio.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, (Kencana, Jakarta 2004), 118

<sup>81</sup> Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, (Kencana, Jakarta 2004) 113

- (1) Menyusun Silabus Silabus diartikan sebagai garis besar, ringkasan, ikhtisar, atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran. Silabus merupakan penjabaran dari standard kompetensi, kompetensi dasar yang ingin dicapai, dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari siswa dalam rangka mencapai standard kompetensi dan kompetensi dasar.
  - (2) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kalau penyusunan silabus bisa dilakukan oleh tim guru atau tim ahli mata pelajaran, maka rencana pembelajaran seyogyanya disusun oleh guru sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Rencana pembelajaran bersifat khusus dan kondisional, dimana setiap sekolah tidak sama kondisi siswa dan sarana prasarana sumber belajarnya. 30 Karena itu, penyusunan rencana pembelajaran didasarkan pada silabus dan kondisi pembelajaran agar kegiatan pembelajaran dapat berlangsung sesuai harapan.
  - (3) Penilaian Pembelajaran Penilaian merupakan tindakan atau proses untuk menentukan nilai terhadap sesuatu. Penilaian merupakan proses yang harus dilakukan oleh guru dalam rangkaian kegiatan pembelajaran. Prinsip penilaian antara lain Valid, mendidik, berorientasi pada kompetensi, adil dan objektif, terbuka, berkesinambungan, menyeluruh, bermakna.
- b) Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam
- Tahap ini merupakan tahap implementasi atau tahap penerapan atas desain perencanaan yang telah dibuat guru sesuai dengan silabus. Sebelum memahami tentang bagaimana melaksanakan pengajaran yang sesuai dengan silabus, terlebih dahulu dipahami apa arti silabus yang sebenarnya. Silabus menurut salim yang dikutip oleh Abdul Majid dalam buku Perencanaan Pembelajaran bahwa silabus dapat di definisikan sebagai “Garis besar, ringkasan, ikhtisar, atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran”.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, (Kencana, Jakarta 2004)116

Jadi, guru hendaknya dalam memberikan mata pelajaran pendidikan agama islam menyesuaikan dengan silabus yang telah ditetapkan atau direncanakan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan saat ini. Dalam kurikulum sudah disusun standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan lainnya menurut tingkat kelas dan dalam pengajaran.

Seorang guru harus memahami kurikulum tersebut karena kurikulum merupakan pedoman pelaksanaan pendidikan dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Seorang guru tinggal melaksanakan kurikulum tersebut sehingga guru harus benar-bener memahaminya, setelah itu maka tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya akan tercapai. Hakikat dari tahap pelaksanaan adalah kegiatan operasional pembelajaran itu sendiri. Dalam tahap ini, guru melakukan interaksi belajar-mengajar melalui penerapan berbagai strategi, metode dan teknik pembelajaran, serta pemanfaatan seperangkat media<sup>83</sup>

c) Sistem Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Keseluruhan kegiatan pengukuran (pengumpulan data dan informasi), pengolahan, penafsiran, dan pertimbangan untuk membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar yang dicapai peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

Tujuan dari evaluasi bagi guru dapat mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan, penguasaan siswa terhadap pelajaran, serta ketepatan atau efektifitas metode mengajar. Tujuan lain dari evaluasi atau penilaian diantaranya ialah untuk dapat menentukan dengan pasti dikelompok mana seorang siswa harus ditempatkan. Sekelompok siswa yang mempunyai hasil penilaian yang sama, akan berada dalam kelompok yang sama dalam belajar.<sup>84</sup>

Jadi inti dari evaluasi adalah menilai hasil belajar anak. Dalam evaluasi terhadap pendidikan agama berarti

---

<sup>83</sup> Agus Maimun dan Agus Zaenul Fitri, *Madrasah Unggulan Lembaga Pendidikan Alternatis Di Era Kompetitif*, (UIN Maliki Press, Malang, 2010), 125.

<sup>84</sup> Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, (Bumi Aksara, Jakarta: 2002), 11

mengadakan kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu pekerjaan didalam pendidikan keagamaan. Keberhasilan suatu kegiatan evaluasi akan dipengaruhi oleh keberhasilan evaluator dalam melaksanakan prosedur evaluasi.

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penulis menyadari bahwa penelitian tentang pelaksanaan pendidikan inklusi bagi anakberkebutuhan khusus dalam ranah PAI di MTs Tarbiyatul Islamiyah Lengkong Batangan. Adalah bukan hal yang baru, akan tetapi banyak penulis yang membahas tentang hal itu secara detail maupun secara umum diantaranya:

Penelitian yang memiliki keterkaitan dengan judul ini antara lain seperti penelitian skripsi yang berjudul “*Analisis kurikulum pendidikan inklusi dan implementasinya di taman kanak-kanak (TK) rumah cita yogyakarta*” yang ditulis oleh sumiyati dengan NIM 09261019 mahasiswa program studi magister pendidikan islam jurusan pendidikan guru RA universitas UIN sunan kalijaga Yogyakarta tahun 2011. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kurikulum pendidikan inklusi di TK rumah cita yogyakarta mempunyai tujuan untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh anak, baik anak normal maupun berkelainan. Kurikulum TK rumah cita berisi muatan- muatan nilai adil gender, inklusivitas, multikultur berpusat pada anak dan memperhatikan anak berpendidikan khusus (ABK). Proses kurikulum meliputi kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan oleh rumah cita. Evaluasi bagi anak didik disampaikan dalam bentuk narasi dalam waktu tiga bulan sekali.<sup>85</sup>

Berdasarkan tesis tersebut memiliki perbedaan dengan skripsi yang peneliti lakukan yaitu tentang kurikulum pendidikan inklusi. Yang mana tesis diatas lebih menekankan faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kurikulum inklusi. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih menekankan pada prose pengelolaan pendidikan inklusi.

Penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini adalah yang berjudul “*Penerapan pendidikan*

---

<sup>85</sup> Sumiyati, *Implementasi kurikulum pendidikan inklusi dan implementasinya di taman kanak-kanak (TK) rumah cita yogyakarta*, tesis, yogyakarta program studi magister pendidikan islam jurusan pendidikan guru RA Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011,42.

*inklusif pada pembelajaran taman kanak-kanak kelompok A (studi kasus di komimo playschool yogyakarta)*” yang ditulis oleh chita faradila NIM: 09111241037 program studi pendidikan PAUD di universitas negeri yogyakarta tahun 2013. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan pendidikan inklusif pada pembelajaran TK kelompok A di komimo playschool yogyakarta, melayani segala kebutuhan peserta didik tanpa segala memandang perbedaan, hal tersebut dapat dilihat diantara salah satunya yaitu: komposisi kelas terdiri dari aspek keberagaman, hal ini bertujuan untuk membelajarkan peserta didik untuk saling menghargai dan peka terhadap sekelilingnya.<sup>86</sup>

Penelitian lain yaitu berjudul “*tingkat kesiapan sekolah dalam implementasi anak berkebutuhan khusus (studi deskriptif pada sekolah dasar di kota semarang tahun ajaran 2012/2013)*” yang di tulis oleh dinda intan widiastuti NIM: 1550407076 fakultas pendidikan jurusan psikologi di universitas negeri semarang 2013. Berdasarkan penelitian tersebut disimpulkan bahwa tingkat kesiapan yang dilihat secara umum pada SD bina harapan, SDN barusari 1, Sd kalicari 1, dan SD Hj.isriati baiturrahman 1 semarang dalam mengimplementasikan pendidikan anak berkebutuhan khusus tergolong dalam kategori cukup siap. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa guru sebagai fungsi sentral dalam proses pendidikan menilai sekolah tempat mereka mengajar mau dan cukup mampu dalam mempraktikkan program layanan inklusi sebagai respon terhadap upaya memajukan pendidikan di Indonesia.<sup>87</sup>

### C. Kerangka Berfikir

Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan

---

<sup>86</sup> chita faradila, “*Penerapan pendidikan inklusif pada pembelajaran taman kanak-kanak kelompok A (studi kasus di komimo playschool yogyakarta)*” skripsi, program studi pendidikan PAUD di universitas negeri yogyakarta, 2013, hal.111.

<sup>87</sup> Dinda intan widiastuti, “*tingkat kesiapan sekolah dalam implementasi anak berkebutuhan khusus (studi deskriptif pada sekolah dasar di kota semarang tahun ajaran 2012/2013)*” skripsi program studi psikologi di universitas negeri semarang, 2013, hal .185.

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Semua manusia berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sama, termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus dapat menikmati pendidikan bersama-sama dengan anak normal lainnya dalam sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif, yaitu sekolah yang memberikan kesempatan belajar pada anak berkebutuhan khusus bersama dengan anak-anak normal pada umumnya. Suparno dan Ilahi juga menyimpulkan bahwa pendidikan inklusi memberikan harapan yang lebih baik dalam upaya memberikan layanan pendidikan pada anak berkebutuhan khusus, dalam konteks pendidikan reguler.

Anak-anak berkebutuhan khusus tidak hanya anak-anak yang memiliki ketunaan dan cacat fisik saja, tetapi juga anak-anak yang memiliki bakat atau potensi kecerdasan diatas rata-rata, anak-anak korban bencana dan anak-anak didaerah terpencil juga termasuk didalamnya. Sebagai sekolah inklusi, MTs Tarbiyatul Islamiyah membutuhkan berbagai hal yang berbeda dengan Madrasah lainnya yang bukan madrasah inklusi, hal ini dikarenakan MTs Tarbiyatul Islamiyah memiliki 2 jenis peserta didik, yaitu peserta didik normal dan peserta didik berkebutuhan khusus. Pembelajaran dalam model pendidikan inklusi memerlukan adanya media, sarana prasarana, kurikulum, kompetensi guru, layanan akademik dan non akademik sedemikian rupa sehingga mampu melayani semua siswanya tanpa terkecuali.

Adanya keberagaman siswa dan tuntutan perkembangan jaman, menuntut MTs Tarbiyatul Islamiyah membenahi pengelolaan sekolah lebih baik lagi. agar suatu lembaga dapat berkembang lebih baik, maka perlu dilakukan inovasi di bidang pengelolaan dan menyediakan sumber daya yang cukup, sehingga diperlukan kerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti masyarakat sekitar, orang tua dan juga pemerintah. Kerja sama yang baik dengan berbagai pihak terkait tersebut akan mempermudah suatu lembaga dalam mencapai tujuan yang diinginkan..

Salah satu pengelolaan yang perlu diperhatikan adalah pengelolaan atau pelaksanaan kurikulumnya, karena menurut dengan adanya kurikulum tersebut proses pembelajaran dapat lebih terarah. Untuk itulah, diperlukan adanya suatu bentuk pengelolaan kurikulum yang lebih mendalam, pengelolaan

berfungsi untuk mempermudah pelaksanaan suatu kegiatan dan tergambar tindakan-tindakan apa saja yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan. Dalam pengelolaan tersebut ada beberapa proses yang perlu diperhatikan, meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi, sehingga melalui tahapan tersebut, layanan dan tujuan dalam pendidikan inklusi tersebut dapat tercapai secara maksimal.

Dari deskripsi tersebut, maka dapat digambarkan dalam kerangka pikir sebagai berikut:

#### Kerangka Berfikir

